

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA *PRO BONO* TERHADAP KLIEN TIDAK MAMPU

Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah negara hukum dengan tujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Kepastian hukum sendiri terdapat kepastian dalam hukum, kepastian karena hukum, dan kepastian dihadapan hukum. Kepastian karena hukum diperoleh dengan adanya pengakuan tertentu, seperti akta autentik yang dibuat notaris atau pejabat yang berwenang lainnya. Notaris adalah pejabat umum wakil dari pemerintah dalam dimensi publik untuk menciptakan kepastian hukum, termasuk bagi orang yang tidak mampu.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab notaris wajib memberikan layanan *pro bono* terhadap orang tidak mampu dan kriterianya serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan secara *pro bono* terhadap orang yang tidak mampu.

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan non doktrinal empiris. Alat pengumpul data yang digunakan diawali dengan studi dokumen, kemudian wawancara dengan para Notaris di Kota Semarang, jenis data yang menjadi acuan penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dengan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman.

Kesimpulan dan saran Notaris wajib memberikan layanan *pro bono* terhadap orang tidak mampu berdasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pelaksanaan menjalankan bantuan hukum secara *pro bono* bersifat subjektif tergantung pemahaman notarisnya berdasarkan pada sikap dari penghadap serta SKTM. Faktor pendukung dari pelayanan hukum secara *pro bono* adalah dengan adanya undang-undang yang mewajibkannya serta kesadaran dari notarisnya. Faktor penghambatnya adalah tidak ada pedoman tata cara yang baku dan pengawasan terkait pelayanan *pro bono*, serta awamnya masyarakat pada undang-undang yang mengatur bantuan *pro bono*. Diperlukan pedoman tata cara dan kriteria klien yang tidak mampu serta pengawasan dari Majelis Pengawas dalam pelaksanaan bantuan hukum secara *pro bono*. Perlunya produk hukum yang tidak memberatkan notaris terkait bantuan *pro bono*.

Kata Kunci: Kewajiban Notaris, *Pro Bono*, Klien Tidak Mampu.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF A NOTARY'S OBLIGATION TO PROVIDE *PRO BONO* LEGAL ASSISTANCE TO INCAPABLE CLIENTS

The Republic of Indonesia as regulated in the 1945 Constitution is a legal state with the aim of realizing justice, legal certainty and benefit. Legal certainty itself includes certainty in the law, certainty because of the law, and certainty before the law. Legal certainty is obtained by certain recognition, such as an authentic deed made by a notary or other authorized official. A notary is a public official representing the government in the public dimension to create legal certainty, including for people who cannot afford it.

This research aims to analyze the reasons why notaries are obliged to provide *pro bono* services to indigent people and the criteria and factors that influence the implementation of notaries' obligations to provide *pro bono* services to indigent people.

The method used in this thesis research is an empirical non-doctrinal approach. The data collection tool used begins with document study, then interviews with Notaries in Semarang City. The types of data used as a reference for this research are primary data and secondary data. Data analysis used was an interactive analysis model according to Miles and Huberman.

Conclusions and suggestions: Notaries are obliged to provide *pro bono* services to indigent people on a philosophical basis, juridical, and sociological. The implementation of *pro bono* legal assistance is subjective depending on the notary's understanding based on the attitude of the person present and the SKTM. The supporting factors for *pro bono* legal services are the existence of laws that require it and the awareness of the notary. The inhibiting factor is that there are no standard guidelines for procedures and supervision regarding *pro bono* services, as well as the public's ignorance of the laws governing *pro bono* assistance. Guidelines on procedures and criteria for indigent clients are needed as well as supervision from the Supervisory Board in the implementation of *pro bono* legal assistance. There is a need for legal products that do not burden notaries regarding *pro bono* assistance.

Keywords: Notary Obligations, *Pro Bono*, Indigent Clients.

